

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
INTI SARI	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kewenangan Pemerintah	14
1. Konsep Kewenangan Pemerintah.....	14
2. Sumber Kewenangan Pemerintah	15
3. Sumber Kewenangan Pembentukan Peraturan oleh Pemerintah ...	18
B. Instrumen Yuridis Pemerintah	25

1. Peraturan Perundang-undangan	26
a. Hierarki Peraturan Perundang-undangan	27
b. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan	31
c. Asas-Asas Hukum Peraturan Perundang-undangan	32
2. Peraturan Kebijakan	34
a. Ciri-Ciri Peraturan Kebijakan	35
b. Materi Muatan Peraturan Kebijakan	36
3. Keputusan Tata Usaha Negara	
a. Definisi dan Unsur Keputusan Tata Usaha Negara.....	38
b. Asas dalam Pembentukan Keputusan Tata Usaha Negara.....	39
C. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.....	39
D. Implementasi Kebijakan Publik.....	40

BAB III Metode Penelitian

A. Jenis dan Sifat Penelitian	42
B. Data Penelitian	42
C. Cara dan Alat Pengumpulan Data	44
D. Analisis Data	45
E. Jalannya Penelitian	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-944/PB/2019 Dalam Instrumen Yuridis Pemerintah	64
--	----

B. Analisis Kesesuaian Materi Muatan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-944/PB/2019 Dengan Peraturan Menteri Keuangan 104/PMK.05/2017.....	84
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN.....	100
INDEKS ISTILAH.....	106
INDEKS SUBJEK.....	109
GLOSARIUM.....	111